



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CHUSNUNIA CHALIM**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **94198**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.577.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1737 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.562.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.312.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/95 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 305.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 208.000.000
6. Tanah Seluas 10540 m² di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 90 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/235 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m²/168 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
10. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 300.000.000



1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.832.147.233
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	19.709.247.233
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.709.247.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.